



Ringkasan Eksekutif

Roadmap (Peta Jalan) Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan bagi Hutan Tanaman Industri Bubur Kayu dan Kertas di Indonesia

Meningkatnya permintaan produk kertas yang murah menyebabkan peningkatan produksi bubur kayu dan kertas di Indonesia. Kebijakan pemerintah, ketersediaan sumberdaya dan kondisi perekonomian telah memfasilitasi peningkatan produksi tersebut. Pada awalnya kebutuhan bahan baku kertas diperoleh dari kayu hutan alam. Namun saat ini, kebutuhan tersebut sebagian besar diperoleh dari Hutan Tanaman Industri Akasia. Selama beberapa dekade terakhir, pengembangan HTI telah mengancam keberadaan hutan alam dan lahan gambut dan menyebabkan hilangnya tutupan hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, subsidi, banjir dan kebakaran di lahan gambut serta

emisi CO₂. Selain itu, pembangunan HTI secara umum dijalankan tanpa persetujuan menyeluruh dari masyarakat sekitar sehingga konflik sosial terhadap kepemilikan lahan dan sumberdaya alam kerap terjadi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini termasuk Inpres No. 8/2015 tentang Moratorium Perijinan di Hutan alam dan Lahan Gambut serta PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, belum terbukti cukup melindungi hutan alam dan lahan gambut di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya celah-celah dalam kebijakan tersebut dan kurangnya penegakan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi masyarakat sipil Indonesia

telah berupaya mendorong peningkatan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan di Indonesia dan menuangkannya ke dalam *roadmap*.

Roadmap ini mengajak para pihak termasuk perusahaan HTI, pemerintah dan LSM untuk bekerjasama dan berkewajiban meningkatkan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dan perusahaan HTI dalam mewujudkan konservasi dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, untuk mencegah banjir dan hilangnya produktifitas HTI serta menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tujuan dan Target

Tujuan:

- Menghentikan pembukaan dan perluasan HTI di hutan alam dan lahan gambut.
- Menyesuaikan pengelolaan saat ini agar lansekap gambut tetap produktif dan berkelanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Target:

1. Tidak ada lagi pembukaan HTI di hutan alam dan lahan gambut, serta memaksimalkan pemanfaatan kawasan tidak berhutan di lahan non-gambut
2. Diketuainya dampak dan tingkat kerusakan lahan gambut (termasuk akibat kebakaran), emisi gas rumah kaca, subsidi, perubahan lansekap gambut, banjir, intrusi air laut dan hilangnya produktivitas lahan akibat pengelolaan HTI serta opsi pengelolaannya ke depan
3. Perusahaan HTI merencanakan dan melakukan *phasing out* yang bertanggung jawab untuk menghentikan subsidi dan emisi GRK pada lansekap gambut
4. Perusahaan HTI menerapkan model pengelolaan gambut yang berkelanjutan pada satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dengan restorasi hidrologi dan rehabilitasi vegetasi menggunakan jenis pohon yang tidak memerlukan drainase (paludikultur)
5. Terjaminnya kelestarian, tersedianya habitat dan kawasan penyangga bagi keanekaragaman hayati di areal HTI dan sekitarnya
6. Menghentikan kebakaran hutan dan lahan serta meminimalisir polusi air dari kegiatan HTI di lahan gambut
7. Diakuinya dan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat (lokal) terhadap sumber daya alam dan lahan, serta mengikutsertakan mereka dalam kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan HTI
8. Terciptanya tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam pengelolaan HTI di Indonesia

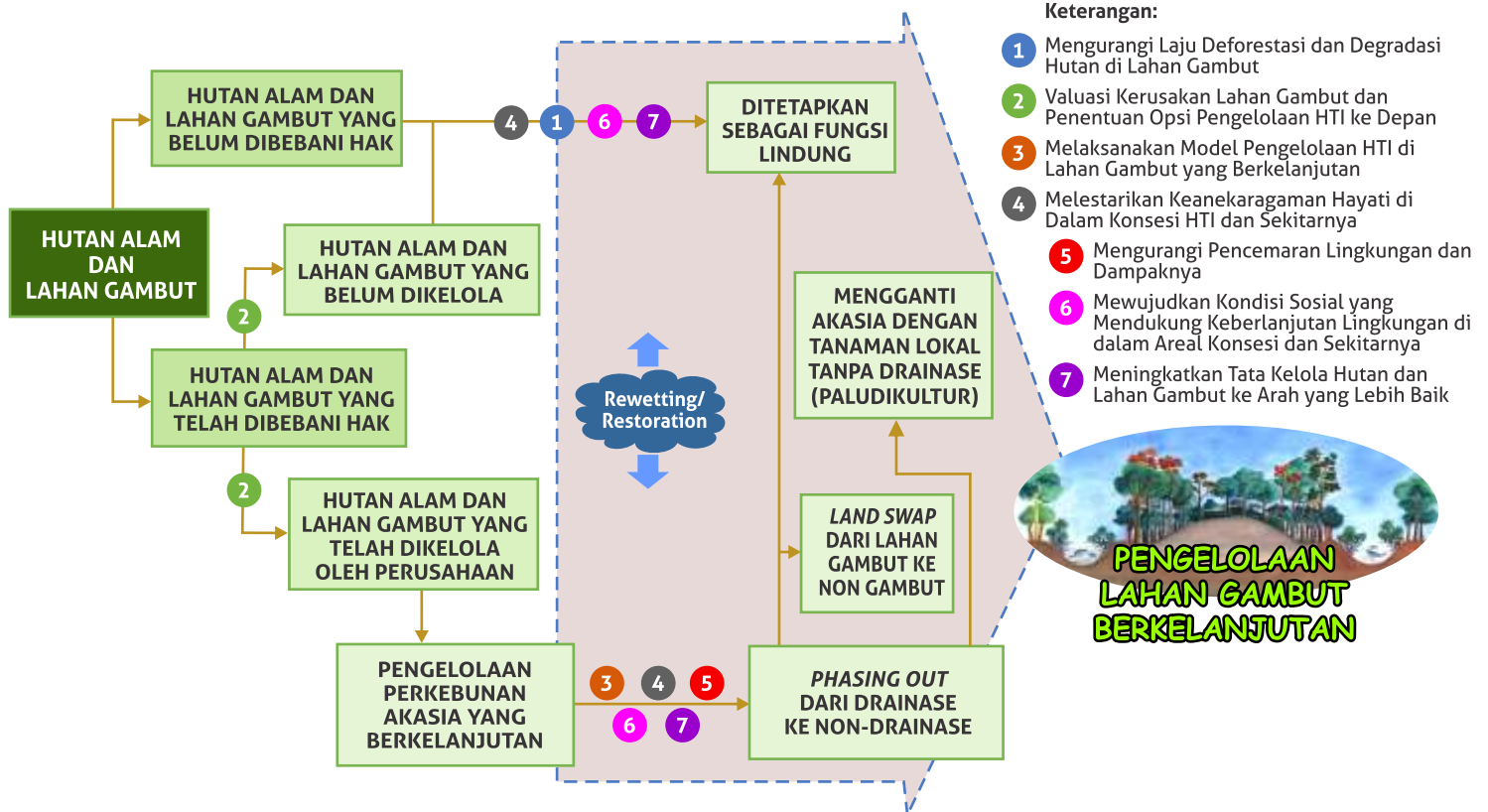


Strategi di atas perlu segera diterapkan agar tujuan utama dari *roadmap* tercapai. Sebagai komitmennya, pemerintah dan perusahaan harus menghentikan pembangunan HTI di hutan alam dan lahan gambut, serta melindungi dan merestorasi kawasan gambut yang belum dikembangkan. Sementara itu, *phasing out* kegiatan berbasis drainase di lahan gambut perlu direncanakan, dimulai dari area yang penting dan diperluas ke area lainnya dalam satu

lansekap. Lahan gambut juga harus direstorasi dengan cara menutup kanal dan dikelola secara berkelanjutan dengan menanam jenis-jenis tanaman lokal yang tidak memerlukan drainase (*paludikultur*). Hal ini akan mencegah gambut dari subsiden, banjir dan hilangnya produktifitas.

Selain itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus semakin ditingkatkan agar resiko kebakaran di hutan alam dan lahan gambut dapat diminimalisir.

Strategi-strategi di atas juga diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan HTI di Indonesia mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dan difasilitasi oleh tata kelola yang lebih baik, sebagaimana tersaji dalam Gambar 2 di bawah ini. Namun, perlu dipertimbangkan apakah perkebunan dalam skala besar dapat menerapkan model yang dimaksud.



Gambar 2. Alur penerapan strategi roadmap pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan bagi hutan tanaman industri bubuk kayu dan kertas dalam praktek HTI di Indonesia

Langkah-langkah dalam setiap strategi yang disampaikan sebagian besar ditujukan bagi pemegang konsesi HTI. Namun dukungan pemerintah serta

pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilannya. Masalah keberlanjutan di lahan gambut merupakan tantangan yang

kompleks dan memerlukan keterlibatan serta kebulatan tekad dari semua pemangku kepentingan, khususnya tanggung jawab dari industri.

Saluran drainase sebagai pembatas perkebunan Akasia, dapat mengancam keutuhan hutan rawa gambut
(Wilayah Kerumutan, Pelalawan, Riau, Februari 2015, oleh: I Nyoman N. Suryadiputra)

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Irwansyah Reza Lubis (rezalubis@wetlands.or.id)

Telly Kurniasari (telly.kurniasari@wetlands.or.id)

www.wetlands.org/indonesia

 Wetlands International

 @WetlandsInt

 Wetlands International

Didukung oleh:

Climate and Land Use Alliance



Wetlands
INTERNATIONAL

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

